

TINDAK PIDANA INVESTASI ILEGAL BERKEDOK KOPERASI

INTISARI

Zita Sekar Moda,¹ Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M.²

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami penjelasan unsur delik kejahatan terhadap harta benda terhadap tindak pidana investasi ilegal berkedok koperasi. Penelitian ini juga berisi studi putusan untuk memahami dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara investasi ilegal berkedok koperasi dengan mengaitkan pada unsur delik kejahatan terhadap harta benda dan kejahatan perbankan.

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian normatif dengan sifat deskriptif. Jenis data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dilakukan dengan mengkaji dokumen berupa putusan pengadilan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode *statue approach* atau pendekatan perundang-undangan dan metode *case study approach* atau pendekatan kasus sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penulisan hukum ini.

Berdasarkan hasil penelitian ini, unsur-unsur yang termasuk dalam tindak pidana investasi ilegal berkedok koperasi meliputi penipuan (*oplichting*) dan penggelapan barang (*verduistering*). Kejahatan perbankan berkaitan dengan perizinan harus melalui tahap perizinan dan menyatakan lembaga berwenang melaksanakan kegiatan usaha perbankan, penghimpunan dana dari masyarakat umum oleh koperasi masuk dalam kejahatan karena koperasi seolah-olah bertindak sebagai lembaga perbankan. Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Mkd menjabarkan terbuktinya tindak pidana penghimpunan dana oleh terdakwa yang dilakukan kepada bukan anggota dan bukan calon anggota serta penanam modal di koperasi tidak mendapatkan haknya, putusan Nomor 404/Pid.B/2018/PN Gpr yang menjabarkan unsur dengan sengaja dan melawan hukum terbuktinya unsur penggelapan yang dilakukan oleh pelaku dengan membuat kredit fiktif serta mengizinkan penarikan dana yang tidak sah, putusan Nomor 627/Pid.Sus/2018/PN Smg menjelaskan bahwa penghimpunan dana dilakukan kepada calon anggota yang belum melakukan pemenuhan administrasi, tetapi dalam putusan ini terdakwa tidak dijerat dengan sanksi pidana, hanya koperasi yang dikenakan sanksi administratif. Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Pyh menjelaskan adanya kesengajaan dengan bermaksud memakai data tabungan nasabah tanpa sepengetahuan pemilik tabungan untuk mencairkan dana.

Kata kunci : Tindak Pidana, Investasi Ilegal, Koperasi.

¹ Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

² Dosen Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

THE CRIME OF ILLEGAL INVESTMENT UNDER UNION

ABSTRACT

Zita Sekar Moda,³ Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M.⁴

This study aims to determine and understand the explanation of the elements of the offense of crimes against property against criminal acts both illegal under the guise of the cooperative. This study also contains a study of the verdict to understand and analyze the consideration of the judge in deciding the case both illegal under the guise of cooperation with the associate on the elements of the offense of crimes against property and crimes banking.

Types of legal research used is normative research with descriptive adjectives. The types of data used include the primary legal materials, secondary, and tertiary conducted by examining the documents in the form of a court ruling. Data analysis was performed using the method of statue approach or the approach of legislation and methods case study approach or the approach of the case in accordance with the issues raised in the writing of this law.

Based on the results of this study, the elements included in a criminal both illegal under the guise of cooperatives include fraud (oplichting) and the embezzlement of goods (verduistering). Banking crimes related to licensing must go through the licensing and declared institution authorized to conduct banking activities, raising funds from the general public by the cooperative entered into crime because of the cooperative as if to act as a banking institution. Decision No. 80/Pid.Sus/2019/PN Mkd lays out a proven criminal acts of fund raising by the defendant committed to non-members and non-prospective members as well as investors in the cooperative did not get their rights, decision No. 404/Pid.B/2018/PN Gpr which lays out the elements of intentionally and unlawfully passed the elements of embezzlement committed by the offender by making fictitious credit as well as permit the withdrawal of funds is not valid, decision No. 627/Pid.Sus/2018/PN Smg explained that the fund raising is done to prospective members who do not perform the fulfillment of the administration, but in this ruling the defendant was not charged with criminal sanctions, only the cooperative subject to administrative sanctions. Decision No. 70/Pid.B/2021/PN Pyh explains the presence of intentional with intend to use the data savings account without the knowledge of the owner of the savings account to withdraw funds.

Keywords : Crimes, Illegal Investment, Union.

³ Student of Criminal Law Department, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada.

⁴ Lecturer at Criminal Law Department, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada.